

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETENTUAN PASAL 19 AYAT (2) UNDANG-UNDANG ADVOKAT TENTANG HAK ADVOKAT MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP PENYITAAAN DOKUMEN KLIEN



Oleh: ANNA HIJRATUL AMALIYAH RAMADHANI (04400212)

Law

Dibuat: 2009-04-28 , dengan 6 file(s).

Keywords: Advokat, Dokumen klien, konflik

ABSTRAK

Profesi advokat sebagai penegak hukum sering diidentikan dengan kliennya dalam menjalankan profesinya seringkali mendapat kesulitan terutama dalam hal penyitaan oleh Penyidik yang sama-sama diatur didalam Undang-Undang Advokat Pasal 19 Ayat (2) dan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP. Metode yang penulis gunakan yaitu menggunakan metode Yuridis Normatif. Dalam prakteknya hak dan kewajiban advokat sering diabaikan oleh aparat penegak lainnya, sehingga banyak pertentangan muncul antar penegak hukum terutama antara advokat dengan penyidik. Penyitaan dalam hukum acara diperbolehkan karena untuk mempermudah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan memperlancar Penyidik untuk melakukan Penyidikan dan pemeriksaan sebelum suatu perkara dipersidangkan di Pengadilan. Namun disisi lain sangat bertentangan dengan tugas advokat yang hak dan kewajibannya diatur oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Namun kenyataannya profesi advokat sangat identik dengan klien dan salah satu kewajiban advokat adalah memberikan perlindungan terhadap klien dan dokumen klien tetapi dalam prakteknya advokat dalam menjalankan tugasnya sering mendapatkan kesulitan ditingkat penyidikan oleh Penyidik yakni dalam hal penyitaan oleh penyidik yang dalam tugasnya mengacu kepada kepada KUHAP yang mengatur tentang penyitaan yang terdapat dalam Pasal 38 Ayat (1). Oleh karena itu disini terjadi pertentangan yang luar biasa mengingat Undang-Undang mana yang lebih dikedepankan, maka dalam hal ini dalam proses penyelesaiannya dapat menggunakan azas *lex specialis derogate lex generalis* yakni KUHAP yang lebih tepat dipakai dalam proses penyidikan oleh Penyidik karena mengingat KUHAP digunakan dalam hukum acara yang mengatur tentang beracara dipersidangan di Pengadilan.

ABSTRACT

Lawyer profession as law enforcer was identical with the client. In doing the profession, lawyer was often having trouble, especially in confiscation by investigation officer which was ruled in Law Act section 19 verse (2) and section 38 verse (1) Criminal Law Procedure Act. Method used by the writer was juridical normative. In its practice, lawyer rights and duty was often neglected by the other law enforcer that cause conflict between law enforcer, especially between lawyer and investigation officer. Confiscation in criminal law procedure was allowed to give a wide authority and make the investigation officer more effective in doing investigation and examination before a case proposed in trial. But in the other side, it was a contradiction with lawyer's duty which was ruled by Act No.18 / 2003 about Lawyer. It was also a contradiction with section 28G Constitution 1945 with section 38 verse (1) Criminal Law Procedure Act. If the section 19 verse (2) Criminal Law Procedure Act couldn't reveal the conflict between

investigation officer and lawyer in client's document confiscation process, since section 28G Constitution 1945 ruled the rights of every person to get protection as an individual, things or document from confiscation. But in its practice, lawyer was often faced trouble which was caused by the conflict with investigation officer which the duty related with criminal law procedure act ruled about confiscation in section 38 verse (1). If the section was conflicted, there could be used *lex specialis derogate lex generalis* principle where there should be a judicial review to criminal law procedure act.